

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Tinjauan Literatur**

Bab kajian pustaka mencakup hasil-hasil penelitian sebelumnya dan konsep-konsep teori yang relevan dengan fokus penelitian:

Literatur pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Abdul Karimi & Matin yakni berjudul “*Moving Away from Foreign Aid: A Case Study of Afghanistan*” (Matin & Karimi, 2021). Literatur ini membahas mengenai bantuan luar negeri di Afghanistan, menjelaskan bantuan luar negeri dari negara-negara pendonor utama, seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, Inggris, Jerman dan lain-lain.

Abdul Karimi & Matin menjelaskan bahwa Afghanistan sudah menerima bantuan luar negeri atau *Foreign Aid* sejak tahun 2002. Penelitian diatas menggunakan pendekatan metode *mix method*. Temuan penting lainnya menurut Abdul Karimi & Matin, bantuan luar negeri ini telah membantu pemerintah Afghanistan dalam banyak hal. Namun, hal ini membuat ketergantungan berkelanjutan. Menyebabkan Afghanistan memiliki pemerintahan yang rentan dan mudah digulingkan oleh kelompok Taliban.

Literatur ini menggunakan konsep *Self-Reliance Policies, Fiscal Policy*, sedangkan penelitian ini menggunakan konsep *Foreign Aid as Foreign Policy* dan *Feminism as National Interest*.

Persamaan penelitian ini ditemukan dalam aspek objek penelitian yakni sama-sama membahas mengenai Foreign Aid AS di Afghanistan, terutama dana bantuan luar negeri yang masuk ke Afghanistan demi membantu negara yang terdampak konflik dan krisis berkepanjangan. Adapun perbedaan penelitian Abdul Karimi & Matin ditemukan pada bentuk bantuan luar negeri ini disalurkan melalui organisasi internasional seperti PBB, sementara dalam penelitian ini akan membahas bantuan luar negeri yang disalurkan melalui organisasi masyarakat sipil yakni WAW dalam konteks mendukung perempuan dan anak di Afghanistan.

Tinjauan literatur kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Dyandhra Vargazhella Igfirly yakni berjudul “**Motif Bantuan Luar Negeri Amerika Serikat Melalui Usaid Dalam *Promoting Gender Equity In National Priority Programs (PROMOTE) Di Afghanistan Pada Tahun 2014-2018***”.

Literatur ini membahas tentang bantuan luar negeri dengan program (PROMOTE) di Afghanistan, program ini merupakan bantuan luar negeri terbesar yang pernah diberikan oleh AS melalui USAID terkait isu gender. Dhyandra menjelaskan bahwa program ini diluncurkan pada tahun 2014 dengan dana sebesar 216\$ juta dolar AS. Penelitian ini mengkaji motif di balik program bantuan yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi perempuan di Afghanistan. Literatur ini menggunakan konsep David Sogge yang membahas motif pemberian bantuan luar negeri seperti motif ekonomi dan penelitian ini membahas mengenai konsep *Foreign Aid as Foreign Policy* dan *Feminism as National Interest*. Menjadikan pembeda dalam penelitian ini.

Temuan penting lainnya, seiring dengan runtuhnya kekuasaan Taliban dan pembentukan pemerintahan baru, Afghanistan mulai melakukan reformasi dalam kebijakan politik dan ekonomi mereka, termasuk dalam hal hak dan kesetaraan bagi perempuan. Amerika Serikat, melalui USAID, melihat ini sebagai kesempatan untuk memberikan bantuan luar negeri dalam upaya penyelesaian isu kesetaraan gender di Afghanistan. Namun, selama pelaksanaan program bantuan, USAID hanya mampu menyediakan dana yang tidak lebih dari setengah dari jumlah yang telah ditetapkan. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang tujuan sejati dari program bantuan PROMOTE di Afghanistan (Igfirly V., 2019).

Persamaan penelitian Dhyandhra ditemukan dalam aspek objek penelitian yakni sama-sama membahas mengenai *Foreign Aid* AS di Afghanistan. Bantuan yang ditujukan untuk mengatasi isu kesetaraan gender di Afghanistan, bantuan ini disalurkan melalui USAID untuk perempuan Afghanistan melalui program PROMOTE, sementara perbedaan dengan penelitian kali ini, membahas mengenai bantuan luar negeri AS melalui upaya dan program-program WAW.

Literatur ketiga berjudul “**Tantangan Pemberian Bantuan luar negeri Amerika Serikat ke Aghanistan Tahun 2021**” (Sahputra et al., 2022). Studi literatur ini menyoroti tantangan yang dihadapi oleh Amerika Serikat (AS) dalam memberikan bantuan luar negeri ke Afghanistan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sahputra dan rekan-rekannya, AS telah mengalokasikan dana bantuan untuk pembangunan pemerintahan, ekonomi, dan masyarakat di Afghanistan. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa dana tersebut belum berhasil menciptakan perubahan yang berarti. Meski telah menerima bantuan, kondisi di Afghanistan masih jauh dari sejahtera. Laporan SIGAR bahkan mencatat bahwa Afghanistan sangat bergantung pada bantuan luar negeri. Literatur ini menggunakan teori pembangunan berkelanjutan sedangkan penelitian ini menggunakan teori ketergantungan/*dependency*.

Temuan penting lainnya, membahas bagaimana dampak dari bantuan luar negeri melalui skema *Official Development Aid* (ODA) dari berbagai negara antara tahun 2002 hingga 2019 terhadap pembangunan di Afghanistan pada tahun 2021. Literatur ini memiliki persamaan, membahas mengenai bantuan luar negeri AS ke Afghanistan pada periode 2021. Adapun perbedaan literatur terkait bantuan luar negeri yang disalurkan melalui NGO WAW dalam konteks mendukung hak perempuan di Afghanistan (Sahputra et al., 2022).

Literatur keempat berjudul “*Picturing Afghan Women’ for Western audiences: The Afghan perspective*” yang ditulis oleh Saumava Mitra (Mitra, 2020). Literatur ini membahas mengenai bagaimana perdamaian AS dengan Taliban akan mengembalikan perempuan ke dalam pengaruh di Afghanistan. Adapun persamaannya dengan penelitian ini, yakni membahas mengenai kondisi perempuan Afghanistan dibawah pemerintahan Taliban. namun terdapat perbedaannya yakni, literatur ini tidak membahas mengenai *Foreign Aid* AS.

Temuan literatur kelima ditulis oleh Lindsay Maizland yang berjudul “**The Taliban in Afghanistan**” (Maizland L., 2021). Literatur ini membahas mengenai Taliban yang kembali berkuasa pada tahun 2021 setelah melakukan pemberontakan selama dua dekade. Temuan penting dari literatur ini adalah, sejak kembali berkuasa, Taliban telah menegakkan interpretasi keras hukum Islam meskipun berjanji untuk menghormati hak-hak perempuan dan komunitas

minoritas agama dan etnis. Selain itu, Taliban juga telah berjuang untuk menyediakan makanan yang cukup dan peluang ekonomi bagi warga Afghanistan. Persamaan terletak pada objek pembahasan keadaan Afghanistan yang kian memburuk dibawah pemerintahan Taliban. perbedaanya terletak pada pembahasan bantuan luar negeri AS.

Dalam konteks penelitian ini, ada dua aspek utama yang menjadi fokus. Aspek pertama adalah tinjauan literatur yang mendalam. Dalam tinjauan ini, peneliti telah mempelajari dan menganalisis sebanyak 75 jurnal yang relevan dengan topik penelitian. Jurnal-jurnal ini membahas berbagai teori dan konsep yang berkaitan dengan bantuan luar negeri AS di Afghanistan. Tinjauan ini penting untuk memahami konteks dan latar belakang dari bantuan luar negeri tersebut, terutama dalam konteks kembali berkuasanya Taliban di Afghanistan.

Aspek kedua adalah analisis data empiris. Dalam aspek ini, peneliti telah mempelajari dan menganalisis berbagai jurnal yang membahas data empiris yang relevan dengan penelitian ini. Analisis ini penting untuk memahami realitas dan dampak nyata dari bantuan luar negeri AS di Afghanistan. Namun, meski telah banyak penelitian yang membahas bantuan luar negeri AS di Afghanistan, masih ada celah pengetahuan yang belum terisi. Belum ada penelitian yang secara khusus membahas bagaimana bantuan luar negeri AS melalui organisasi Women for Afghan Women (WAW) berperan dalam mempromosikan hak-hak perempuan Afghanistan di bawah pemerintahan Taliban. Ini menjadi titik awal dari penelitian ini, di mana peneliti berusaha untuk mengisi celah pengetahuan tersebut dan memberikan pemahaman baru tentang peran dan dampak WAW dalam mempromosikan hak-hak perempuan di Afghanistan.

**Tabel 2. 1 Tinjauan Literatur**

No	Judul	Penulis	Bidang	Topik	Temuan	Persamaan	Perbedaan
1.	<i>Foreign Aid and Foreign Policy</i> (Bindra S, 2018)	Sukhwant S Bindra, <i>Journal of International Issue</i> , (2018).	International Relations	Foreign Aid	Historis tentang filosofi dan praktik pada Bantuan luar negeri.	Membahas mengenai bantuan luar negeri sebagai instrument pendukung kebijakan luar negeri	Tidak membahas mengenai bantuan luar negeri AS di Afghanistan melalui WAW
2.	<i>Humanitarian: Keyword</i> (Lauri D, 2020)	Antonio De Lauri, <i>E-Book, Brill</i> , (2020).	International Relations	Foreign aid in Human Right	Bantuan asing dalam konteks kemanusiaan yang mem-Pengaruhi Hubungan Internasional	Membahas bantuan luar negeri sebagai bantuan kemanusiaan, militer, ekonomi dalam HI	Tidak membahas mengenai bantuan luar negeri AS di Afghanistan melalui WAW
3.	<i>Foreign Aid as Foreign Policy Tools</i> (Apodaca, 2017)	Clair Apodaca, <i>Journal of Oxford Research Encyclo-Pedia of Politics</i> , (2017).	International Relations	Foreign Aid in Foreign Policy	Negara-negara di Dunia terlibat dalam bantuan asing, negara sebagai donor atau penerima	Membahas mengenai cara negara mencapai tujuan kebijakan luar negerinya dengan penggunaan bantuan luar negeri	Tidak membahas mengenai bantuan luar negeri AS di Afghanistan melalui WAW
4.	<i>Regional changes in the distribution of foreign aid: An entropy approach</i> (Salois, 2013)	Matthew J Salois, <i>Journal of Elsevier</i> , (2013).	International Relations	Foreign Aid	Bantuan asing yg berubah seiring waktu ini mem- pengaruhi negara penerima	Membahas mengenai bantuan asing dalam konsep regional	Tidak membahas mengenai bantuan luar negeri AS di Afghanistan melalui WAW
5.	<i>Foreign Aid, Human Rights, and Democracy Promotion: Evidence from a Natural Experiment</i> (Carnegie & Marinov, 2017)	Allison Carnegie and Nikolay Marinov, <i>Journal of Political Science</i> , (2017).	Political Science	Foreign aid in Human Right	Mempertimbangkan kondisionalitas dalam alokasi bantuan asing menerapkan kebijakan bantuan.	Membahas bantuan luar negeri dapat mengatasi permasalahan isu kemanusiaan.	Tidak membahas mengenai bantuan luar negeri AS di Afghanistan melalui WAW

6.	<i>Human Rights in International Relations</i> (Fathun, 2017)	Laode Muh Fathun, <i>Journal of Mandala</i> , (2017).	International Relations	Human Rights	Masalah Terkait HAM masih Menjadi sorotan penting dalam HI	Membahas mengenai isu HAM menjadi perdebatan pasca Perang dingin	Tidak membahas mengenai HAM di Afghanistan
7.	Peranan Hukum Internasional dalam Penegakan Hak Asasi Manusia (Sinaga, 2018)	Thor B Sinaga, <i>Journal Of law UNSRAT</i> , (2018).	Law	Human Rights	Manusia berhak mendapatkan Hak asasi manusia	Membahas mengenai Hak asasi manusia	Tidak membahas Bantuan luar negeri AS
8.	<i>The Impact of The Sectoral Allocation of Foreign Aid on Gender Inequality</i> (Pickbourn & Ndikumana, 2016)	Lynda Pickbourn& Leonce Ndikumana, <i>Journal of International Development</i> , (2016).	International Relations	Foreign Aid in Women Agenda	Dampak bantuan terhadap ketidaksetaraan gender bergantung pada perkembangan perkapita	Membahas mengenai bantuan asing dalam pemberdaya perempuan	Tidak membahas mengenai kesetaraan gender di Afghanistan
9.	Kerangka Studi Feminisme (Model Penelitian Kualitatif tentang Perempuan dalam Koridor Sosial Keagamaan) (Karim, 2014)	Abdul Karim, <i>Jurnal Stain Kudus</i> , (2014).	social science and religion	Gender.	Perbedaan mendasar Perempuan dan laki-laki, serta dampak perbedaan tersebut dalam aspek kehidupan sosial dan politik.	Membahas mengenai perbedaan perempuan dan laki-laki secara biologis	Tidak membahas mengenai isu gender di Afghanistan
10.	Redefinisi Gender dan Seks (Kartini et al., 2019)	Kartini, A., Al-Choeriyah, M., Tasikmalaya, C., & Maulana, A. <i>Jurnal Kajian Perempuan &amp; Keislaman</i> , (2019).	Gender and Religion	Gender	Konsep gender didefinisikan sebagai hasil dari konstruksi sosial	Membahas mengenai definisi gender yang melibatkan perempuan dan laki-laki dalam struktur masyarakat	Tidak membahas konsep gender di Afghanistan

11.	<i>Survey of Foreign Aid: History, Trends and Allocation</i> (White Howard, 2000)	Howard White, (2000).		Konsep Foreign Aid	Historis asal usul bantuan asing	Membahas mengenai permulaan bantuan luar negeri	Tidak membahas mengenai bantuan luar negeri AS
12.	<i>U.S Foreign Policy and Human Rights Violations in Latin America</i> (Schoultz, 1981)	Lars Schoultz, <i>Journal of Comparative Politics</i> , (1981).	International Relations	US foreign Policy	Pemerintah AS merumuskan kebijakan hak asasi manusia yg disebut “Hak anti-penyiksaan” dan mengana-lisis implemen-Tasi kebijakan tsb.	Membahas mengenai dana <i>foreign aid</i> melalui program ekonomi, bantuan militer & bantuan kemanusiaan yang berfungsi sebagai implementasi kebijakan luar negeri Amerika Serikat	Tidak membahas HAM di dan foreign aid AS di Afghanistan
13.	<i>Clarifying The Foreign Aid Puzzle, A Comparison of America, Japanese, French, and Swedish Aid Flow</i> (Schraeder et al., 1998)	Peter J. Schraeder, Steven W. Hook & Bruce Taylor, <i>Journal of Cambridge University</i> , (1998).	International Relations	Foreign Aid AS	Bantuan asing mempengaruhi dinamika HI dan berbagai negara menggunakan bantuan asing sebagai alat kebijakan luar negeri negaranya.	Membahas mengenai AS menggunakan bantuan asing untuk kepentingan AS.	Tidak membahas mengenai bantuan luar negeri AS di Afghanistan
14.	<i>U.S Withdraw from Afghanistan as the Taliban Take Control</i> (Eichensehr Kristen, 2021)	Kristen Eichensher, <i>American Journal of International Law</i> , (2021).	International law	Penarikam Militer AS di Afghanistan	Operasi evakuasi yang dilakukan pada agustus 2021 secara besar-besaran untuk mengevakuasi warga negara mereka yang dianggap berisiko menghadapi serangan balik dari Taliban	Mengakhiri konflik di Afghanistan dengan melakukan penarikan militer sebagai kebijakan luar negeri AS	Tidak membahas mengenai isu gender di Afghanistan

15.	<i>The (im)possibilities Of Disaster Risk Reduction The Context of High-Intensity Conflict: The Case Afghanistan</i> (Mena & Hilhorst, 2021)	Rodrigo Mena, Dorothea Hilhorst, <i>Journal of Environmen-Tal Hazards</i> , (2021).	Environmental	Conflict Afghanistan	Afghanistan menunjukan bahwa DRR di negara-negara dengan konflik berintensitas tinggi	Membahas mengenai dampak dari konflik Afghanistan seperti kematian masyarakat sipil	Tidak membahas mengenai bantuan luar negeri AS
16.	Dampak Kemenangan Taliban atas Afghanistan Terhadap Kegiatan Terorisme di Indonesia (Muttamimah, 2022)	Dewi Kamal Muttamimah, <i>Jurnal Transformasi Global</i> , (2022).	International Relations	Taliban and AS	Kembalinya Taliban berkuasa di Afghanistan setelah konflik 20 tahun dengan Amerika Serikat.	Membahas mengenai Konflik antara AS dan Taliban yang menjadi pergolakan diberbagai sektor yang terjadi dari abad ke-16 sampai abad ke-21 saat ini.	Tidak membahas mengenai bantuan luar negeri AS di Afghanistan
17.	<i>Foreign Aid : Diplomacy, Development, Domestic Politics</i> (Pomerantz, 2007)	Carol Lancaster Pomerantz, <i>Journal of Political Science Quarterly</i> , (2007).	International Relations	Foreign Aid	Tujuan bantuan asing sebagai alat diplomasi, menurut penulis tujuan terutama untuk mendukung pembangunan di negara-negara miskin.	Membahas mengenai Tujuan bantuan asing untuk memenuhi norma hubungan internasional yang mewajibkan negara maju untuk membantu negara berkembang.	Tidak membahas mengenai bantuan luar negeri AS di Afghanistan.
18.	<i>Moving Away from Foreign Aid: A Case Study of Afghanistan.</i> (Matin & Matin Karimi, 2021)	Abdul Karimi & Martin, MPRA Paper, (2021).	International Relations	Foreign Aid AS in Afghanistan	Aliran hibah bantuan luar negeri membantuk pemerintah Afghanistan secara ekonomi dan banyak hal	Membahas mengenai dana Bantuan luar negeri yang masuk ke Afghanistan.	Tidak membahas mengenai bantuan luar negeri AS di Afghanistan melalui upaya waw.
19	<i>The US Withdrawal from Afghanistan</i>	Yoram Schweitzer, Oded Eran, <i>INSS Insight</i> , (2021).			Topik serangan Amerika di Afghanistan untuk	Membahas	Tidak membahas mengenai bantuan

	<i>portends a vacuum and uncertain future</i> (Schweitzer & Eran, 2021)		International Relations	Foreign Policy AS in Afghanistan	menyerang Taliban yang melindungi al-Qaeda.	Kebijakan Joe Biden menarik pasukan dari Afghanistan secara total.	luar negeri AS di Afghanistan.
20.	Krisis Afghanistan dan Implikasi Terhadap Politik Global (Anugerah, 2022)	Boy Anugerah, Jurnal, (2022).	International Relations	Crisis Afghanistan under Taliban	Taliban sulit mendapatkan pengakuan dari negara lain atas kedaulatannya.	Membahas mengenai bantuan AS secara finansial maupun non-finansial.	Tidak membahas mengenai bantuan luar negeri AS di Afghanistan.
21.	Kondisi Politik dan Keamanan Afghanistan di bawah Rezim Taliban dan Signifikansinya Terhadap Geopolitik Global. (Anugerah & Purba, 2021)	Boy Anugerah, Jabinson Purba, Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, (2021).	National Security	Conflict in Afghanistan	Invasi Amerika Serikat dan sekutu pada tahun 2001, dan pada tahun 2021, AS menarik pasukan militer dari Afghanistan.	Membahas mengenai kondisi Afghanistan setelah penarikan pasukan militer AS secara menyeluruh	Tidak membahas mengenai isu gender di Afghanistan
22.	<i>The Structure of Dependence</i> (Santos, 1970)	Theotonio Dos Santos, American Economic Association, 1970	International Relations	Theory Dependence	Menurut Dos Santos, definisi ketergantungan dimana ekonomi negara menghasilkan ketergantungan	Membahas mengenai teori ketergantungan	Tidak membahas <i>Foreign aid</i> AS dalam teori ketergantungan
23.	<i>Women vs Feminism: Why We All Need Liberating form the Gender Wars</i> (J. Williams, 2017)	Joanna Williams, <i>book of Emerald Publishing Limited</i> , (2017).	Feminism	Feminism	<i>Women's Lives Today, Private Relationships, Public Concerns &amp; Feminism then and now</i> , yang membahas pendidikan, pekerjaan, kesenjangan gender dan perubahan feminisme dari waktu ke waktu	Membahas mengenai feminisme dapat dilihat dari kebijakan luar negerinya	Tidak membahas isu gender di Afghanistan

24.	<i>Achieving sustainable development goals: predicaments and strategies</i> (Swain & Yang-Wallentin, 2020)	R.Bali Swain & F. Yang-Wallentin, <i>International Journal of Sustainable Development &amp; World Ecology</i> , (2020).	Sustainable Development	Development in Afghanistan	Bantuan luar negeri sebagai bantuan yang bersifat kemanusiaan dengan fokus mereka pada faktor ekonomi dan sosial	Membahas tentang bantuan luar negeri sebagai bantuan yang disalurkan untuk bantuan kemanusiaan	Tidak membahas bantuan luar negeri AS melalui WAW
25.	Alasan PBB Memperpanjang Misi UNAMA di Afghanistan (Putri Leniana & Khairunnisa Faurziah, 2023)	Leniana Devi, Salma Fauziah, <i>Jurnal Pena Wimaya</i> , (2023).	International Relations	Foreign Ain in Afghanistan	Misi UNAMA mempromosikan perdamaian, mewujudkan stabilitas keamanan, hak asasi perempuan.	Membahas mengenai Taliban yang mulai menguasai Afghanistan dan membuat kekacauan di kota-kota besar.	Tidak membahas mengenai Bantuan luar negeri AS
26.	Dampak Penarikan Pasukan Amerika dari Afghanistan terhadap Hak Asasi Khususnya Hak Perempuan (Meilanie et al., 2022)	Kadek Meilanie, Chandra Dewi & Agung Sri Utari, (2022).	International Relations	Foreign policy AS in Afghanistan	Penarikan militer Amerika Serikat berdampak buruk kepada hak perempuan disana karena Taliban mengambil alih pemerintahan di Afghanistan	Larangan yang membatasi hak perempuan dan merugikan perempuan Afghanistan	Tidak membahas bantuan luar negeri AS
27.	Perspektif Feminisme dalam Memahami Permasalahan Hak asasi Manusia Kelompok Queer di Kota Semarang, Indonesia	Adam Salsa Novarin dan Shary Charlotte Henriette Pattipeihly, <i>Jurnal HAM</i> , (2020).	Human Right	Human right and gender	Membahas hak asasi manusia dan hak asasi perempuan melalui perspektif radikal feminism	Membahas patriarki yang dimana adanya dominasi yang lebih pada laki-laki	Tidak membahas Bantuan luar negeri AS

	(Novarin & Pattipeilhy, 2020b)						
28.	<i>Pashtunwali- Law for the lawless, Defense for the stateless</i> (Benson & Siddiqui, 2014)	Bruce L. Benson & Zafar R. Siddiqui, <i>International Review of Law and Economics</i> , (2014).	Law	Pashtunwali	Kebudayaan di Afghanistan prinsip sebagai kehormatan dalam keluarga	Membahas mengenai budaya Pashtunwali yang melekat di masyarakat Afghanistan yg menjadikan laki-laki lebih mendominasi	Tidak membahas bantuan luar negeri AS
29.	Analisis kegagalan Afghanistan Dalam Eliminasi Kasus Honor Killing Tahun 2011-2018 (Kt et al., n.d.)	Ni Kt Rai Purwati, Ni Wayan Rainy Priadarsini, dan Putu Ratih Kumala Dewi, <i>Jurnal Hubungan Internasional</i> , (2018).	International Relations	Culture Afghanistan	<i>Honor Killings</i> adalah pembunuhan perempuan demi kehormatan yang aksinya direncanakan pelaksanaannya oleh pihak anggota keluarga di Afghanistan	Membahas ap aitu <i>Honor Killings</i> di Afghanistan	Tidak membahas mengenai Bantuan Luar negeri AS di Afghanistan
30.	Politik Kekerasan Taliban di Afghanistan: Telaah Historis Sosiologis Perspektif Weberian ( <i>The Taliban Politics Of Violence In Afghanistan : A Weberian Historical-Sociological Perspective</i> ) (Mawardi & Nur Idayanti, n.d.)	Imam Mawardi, Lutfi Rahman, Umi Nur Idayanti, <i>Jurnal TAPIS</i> , (2022).	Sociology	Taliban	Politik yang bersifat kekerasan dijadikan pedoman bagi aksi perang dan revolusi mereka yakni jihad Taliban di Afghanistan	Membahas Taliban sebagai kelompok entitas Islam yang konservatif	Tidak membahas mengenai bantuan luar negeri AS

31.	<i>Afghan Women and Girl : Status and Congressional Action Background on The Status of Women</i> (Thomas, 2021)	Thomas, Crsreports.Congress.gov, (2021)	International Relations	Women in Afghanistan	Kondisi perempuan dan anak perempuan di Afghanistan saat Taliban mengambil alih negara Afghanistan	Menggambarkan Taliban sebagai kelompok penindas perempuan di Afghanistan	Tidak membahas bantuan luar negeri AS di Afghanistan
32.	Aneksasi Afghanistan Terhadap Taliban Tahun 2021 (Putra, 2021).	Kadek Surya Alit Dharma Putra, Jurnal Komunitas YUSTISIA, (2021).	Political Science	Taliban	Pandangan Hukum Internasional terhadap Konsep Kepentingan Nasional	Taliban membatasi hak perempuan dan membuat kebijakan yang menyimpang dari hak asasi manusia	Tidak membahas mengenai bantuan luar negeri AS di Afghanistan
33.	<i>The Dramatic Siege of US-Occupied Afghanistan</i> (Muralidharan, 2021)	Sukumar Muralidharan, (2021)	International Relations	Foreign Aid AS in Afghanistan	Jatuhnya Kabul mewakili kegagalan strategi AS	As fokus pada bantuan pembangunan di Afghanistan selama 20 tahun	Tidak membahas mengenai isu gender
34.	<i>The Implications of the US Troops Withdrawal for Afghan Women</i> (Tadjbakhsh, 2021)	Tadjbakhsh, (2021)	International Relations	NGO Women in Afghanistan	Pengaruh Taliban pasca penarikan militer AS akan merugikan perempuan Afghanistan	Membahas mengenai Organisasi perempuan yang berjuang melawan kekejaman pemerintahan Taliban	Tidak membahas tentang bantuan luar negeri AS
35.	Tantangan Pemberian Bantuan luar negeri Amerika Serikat ke Aghanistan Tahun 2021	Indra Sahputra, Sahputa, (2020).	International Relations	US Foreign aid in Afghanistan	AS memberikan dana bantuan yang diberikan untuk membangun Afghanistan	Amerika memberikan bantuan luar negeri di Afghanistan	Tidak membahas isu gender

	(Sahputra et al., 2022)						
36.	Perdebatan Mengenai Perempuan di Amerika (Meiliana Sylvie, 2012)	Sylvie Meiliana, Jurnal nasional, (2012).	Gender Studies	Feminisme di Amerika	Feminisme muncul di Amerika dan upaya meningkatkan posisi masyarakat di	Membahas mengenai kemunculan Gerakan Feminisme di Amerika Serikat	Tidak membahas mengenai Bantuan luar negeri
37.	<i>US Exit from Afghanistan: Impact on Pakistan and India</i> (Muzaffar et al., 2021)	Dr. Muhammad Muzaffar, Dr. Zahid Yaseen & Naila Afzal, Journal of Political Studies, (2021)	International Relations	Foreign Policy AS in Afghanistan	Penarikan militer AS secara penuh berdampak pada proses perdamaian di wilayah tersebut	Membahas mengenai kebijakan luar negeri AS di Afghanistan	Tidak membahas bantuan luar negeri AS
38.	<i>The Cost of Support to Afghanistan: Considering Inequality, Poverty and Lack of Democracy Through The "Rentier State" lens</i> (Clark Kate, 2020)	Kate Clark, <i>Report of Afghanistan Analysts Network</i> , (2020).	Political Studies	Foreign Aid in Afghanistan	Membahas kesenjangan Afghanistan yang menerima bantuan internasional namun selama dua dekade ini, masyarakat Afghanistan masih berada di kemiskinan yang mendalam	Membahas mengenai bantuan luar negeri yang mengalir ke Afghanistan	Tidak membahas bantuan AS melalui WAW
39.	<i>US Afghan Relations: A Historical Perspective of Events of 9/11</i> (Jabeen et al., 2020)	Mussarat Jabeen, Muhammad Saleem Mazhar & Naheed S.Goraya, Journal of South Asian Studies, (2020).	Political Studies	Foreign Policy AS in Afghanistan	Amerika Serikat sebagai negara yang mempunyai kekuatan besar dalam mencapai tujuannya, terutama seperti kebijakan AS terhadap Taliban di Afghanistan	Membahas mengenai kebijakan AS di Afghanistan	Tidak membahas mengenai bantuan luar negeri AS
40.	<i>Biden The Realist</i>	Joshua Shiffrinson, Stephen Wertheim, Foreign Affairs, (2021).	International Relations		Kebijakan Joe Biden mengakhiri konflik 20	Membahas kebijakan AS dibawah pemerintaham Joe Biden	Tidak membahas mengenai bantuan

	(Shifrinson & Wertheim, 2021)			Foreign Policy AS in Afghanistan	tahun di Afghanistan atas kepentingan nasional AS		luar negeri AS melalui WAW
41.	Pembangunan Gender dan Benturan Tradisi (Abdullah, 2013)	Suparman Abdullah, Jurnal Socius, (2013).	Gender Studies	Gender	Definisi gender dan pandangan masyarakat terkait gender	Membahas mengenai perbedaan seks dan gender	Tidak membahas mengenai gender di Afghanistan
42.	Bacha Posh: Kejahatan Kemanusiaan di Dalam Selimut Tradisi dan Kebudayaan Negara Afghanistan	Arinta Fridha, Ika Rismawanti Putranti, Marten Hanura, Journal of International Relations Undip, 2022 (Pangestika, 2022)	International Relations	Tradisi Bacha Posh di Afghanistan	Dampak tradisi Bacha Posh dalam menanggapi pelanggaran di Afghanistan pasca pemerintahan Taliban	Membahas mengenai tradisi di Afghanistan yang merugikan perempuan Afghanistan	Tidak membahas mengenai tradisi Bacha Posh
43.	<i>Women's Voices, Women Rights</i> (Jeffries, 1999)	Alison Jeffries, Book of Routledge, (1999).	Gender Studies	Feminism	Nilai-nilai liberalism dan kontribusi politik terhadap argument konteks internasional dimana status perempuan terus menerus terancam	Membahas mengenai perspektif liberalism, feminisme terhadap isu hak asasi manusia	Tidak membahas mengenai isu penindasan perempuan di Afghanistan
44.	<i>US-Taliban Talks for Afghan Peace: Complexities Galore</i> (Behuria et al., 2019)	Ashok Behuria, Yaqoob UI Hassan & Sanya Saroha, Journal of Taylor & Francis, (2019).	International Relations	US & Taliban Diplomacy	Proses damai AS dan Taliban saat penarikan pasukan militer AS dan berbagai pihak yg terlibat untuk mencegah kembali konflik dan kekerasan	Membahas mengenai kesepakatan Taliban dan AS untuk berdamai setelah kebijakan penarikan pasukan militer	Tidak membahas mengenai bantuan luar negeri AS
45.	Analisis Gender dan Transformasi Sosial (Fakih, 2013)	Mansour Fakih, Buku Pustaka Pelajar,(2013).	Gender Studies	Gender as Concept	Definisi konsep seks dan konsep gender, dan teori sosialis	Membahas mengenai konsep gender dan juga perspektif feminisme	Tidak membahas mengenai gender di Afghanistan

46.	<i>The Dependency Approach</i> (Smith, 2018)	Tony Smith, 2018	International Relations	Theory Dependency	Struktur dari pendekatan teori ketergantungan untuk studia dunia keiga	Membahas mengenai teori ketergantungan	Tidak membahas mengenai Afghanistan yang ketergantungan oleh ekonomi AS
47.	Mengintip Feminisme dan Gerakan Perempuan	Khoirul Faizain, EGALITA, 2007	Feminisme	Feminisme Liberal	Jurnal ini membahas perkembangan mengenai teori feminisme dan feminisme liberal	Membahas mengenai konsep Feminisme Liberal	Tidak membahas mengenai kosnep feminism sebagai pemenuh kepentingan nasional
48.	<i>Analysis of China's National Interest</i> (Xuentong, 1997)	Yan Xuentong, Taijin People Press, 1997	International Relations	National Interest	Dalam konteks Hunbungan Internasional, menyoroti persepsi tentang kepentingan nasional seperti kepentingan ideologi, tata internasiional yang telah mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara	Membahas mengenai kepentingan tata internasional dan kepentingan ideologi	Tidak membahas mengenai kebijakan luar negeri AS
49.	<i>Understanding International Relations</i> (Brown & Ainley, 2005)	Chris Brown & Kristen Ainley, Palgrave Macmillan, 2009	International Relations	Analysis Foreign Policy	Penulis berpendapat peran penting individu dalam menggerakkan kebijakan luar negeri baik domestic maupun internasional	Membahas mengenai Dalam Hubungan Internasional, persepsi tentang kepentingan nasional seperti ideologi dan tata internasional mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara.	Tidak membahas mengenai bantuan luar negeri AS
50.	<i>Foreign Policy Analysis, Classic and Contemporary</i> (Hudson, 2014)	Valerie M. Hudson, Rowman & Littlefield, 2014	International Relations	Analysis Foreign Policy	Dalam buku ini membahas bahwa kebijakan luar negeri bukan sekedar tentang negara saja, melainkan ada faktor lain seperti	Membahas mengenai kebijakan luar negeri dalam hubungan internasional	Tidak membahas mengenai kebijakan luar negeri AS di Afghanistan

					individu, domestik dan juga budaya strategis		
51.	Politik Global dalam Teori & Praktik (Jemadu, 2008)	Aleksius Jemadu, Book of Graha Ilmu, 2008	International Relations	Analysis Foreign Policy	Kebijakan luar negeri menurut buku ini, Strategi negara dalam berhubungan dengan negara atau pelaku lain untuk mencapai tujuan nasionalnya	Membahas mengenai definisi kebijakan luar negeri	Tidak membahas mengenai kebijakan luar negeri AS di Afghanistan
52.	The Afghanistan Papers: A Secret History of The War, 2021)	Craig Whitlock, Book of Simon & Schuster, 2021	International Relations	US in Afghanistan	Kebijakan AS menetap di Afghanistan selama dua dekade meskipun Osama bin Laden sudah menjadi ancaman yang tidak signifikan	Membahas mengenai kegagalan AS dalam menciptakan perdamaian di Afghanistan	Tidak membahas mengenai bantuan luar negeri AS di Afghanistan
53.	<i>Picturing Afghan Women' for Western audiences: The Afghan perspective</i> (Mitra, 2020b)	Saumava Mitra, University for Peace, Costa Rica,(2020).	International Relations	Gender in Afghanistan	Perdamaian AS dengan Taliban akan mengembalikan perempuan ke dalam pengaruh di Afghanistan	Membahas mengenai kondisi perempuan di Afghanistan saat Taliban berkuasa	Tidak membahas mengenai bantuan luar negeri AS di Afghanistan
54.	<i>A Qualitative Study of Women's Lived Experiences of Conflict and Domestic Violence in Afghanistan</i> (Mannell et al., 2021)	Jenevieve Mannell, Gulraj Grewal. Aayesha Ahmad, Journal of Sagepub, (2021).	Gender Studies	Violence Against Afghanistan women	Kekerasan yang dialami perempuan di Afghanistan seperti kekerasan kibat kehilangan dukungan patriarkal, kekerasan dari perdagangan narkoba dan kemiskinan terkait konflik	Membahas mengenai kekerasan yang di alami perempuan Afghanistan	Tidak membahas mengenai Bantuan luar negeri AS
55.	<i>Migration, Stress and the Challenges of Accessing Food: An Exploratory</i>	Foorough Kavian, Kaye Mehta, Eileen WilLIS, Lilian Mwanri, Paul Ward & Sue Booth,			Pengungsi perempuan wanita Afghanistan yang mengalami Stresor yang cukup besar baik di	Membahas mengenai kondisi perempuan Afghanistan	Tidak membahas mengenai bantuan luar negeri AS

	<i>Study of the Experience of Recent Afghan Women Refugees in Adelaide, Australia</i> (Kavian et al., 2020)	International Journal, (2020).	International Relations	Afghan Women	negara sendiri maupun negara pengungsi		
56.	<i>Being a Woman under Taliban's Theocratic Regime</i> (Kallini, 2021)	Stavroula Xristina Kallini, Journal of HAPSc Working Paper, (2021).	International Relations	Violence Against Afghanistan women under Taliban	Pelanggaran hak asasi manusia terutama perempuan yang menjadi target utama aksi politik Taliban, dengan memodifikasi budaya Pashunwali yang sangat merendahkan posisi pemerintah	Membahas mengenai pembatasan hak perempuan di Afghanistan dibawah rezim Taliban	Tidak membahas mengenai bantuan luar negeri AS
57.	<i>NGOs in Afghanistan: Impact of Activities and Attributes on Attack</i>	Kathryn M. Lambert, Journal of Strategic Security, 2022	Security	NGO in Afghanistan	Aktivitas INGO dan program yang berfokus pada gender dari setiap organisasi seperti pemberdayaan perempuan atau hak-hak perempuan di Afghanistan	Membahas NGO yang bekerja di Afghanistan	Tidak membahas mengenai organisasi non-pemerintah Women for Afghan Women
58.	<i>Higher education opportunities and challenges in Afghanistan: Afghan women's perspective</i> (Ahmadi, 2022)	Fahima Ahmadi, Brac University, (2022).	Feminisme	Feminism in Afghanistan	Perjuangan perempuan di Afghanistan untuk kesetaraan gender dan akses pendidikan menjadi tantangan yang sangat sulit terutama saat Taliban kembali berkuasa	Membahas mengenai tantangan perempuan dalam kesetaraan gender dan akses pendidikan yang dibatasi oleh Taliban	Tidak membahas mengenai WAW
59.	<i>Towards Transnational Feminist</i>	Mutatis Mutandis, Journal of Memoria Academy, (2020).	Feminisme	Feminisme	Lahirnya Feminisme transnasional yang	Membahas mengenai Feminisme yang bermula di AS	Tidak membahas mengenai bantuan luar negeri AS

	<i>Translation Studies</i> (Castro et al., 2020)				dikembangkan di Amerika		dalam perspektif feminisme
60.	<i>Can The United Nations Deliver a Feminist Future?</i> (Sandler & Goetz, 2020)	Joanne Sandler & Anne Marie Goetz, <i>Journal of Gender &amp; Development</i> , (2020)	Feminisme	IO in Afghanistan	AS dan PBB yang menunjukkan dukungan dalam mendorong peningkatan hak-hak perempuan	Membahas mengenai peran AS dan juga bantuan PBB dalam mendukung kemajuan dalam penerapan hak-hak perempuan	Tidak membahas mengenai bantuan luar negeri AS di Afghanistan
61.	Sejarah Perang Afghanistan Dari Dulu Hingga Sekarang (Azria & Ramayani, 2022a)	Kaiva Azria & Erma Ramayani, <i>Jurnal Power in International Relations</i> , (2022).	International Relations	US-Afghan Conflict	Ada beberapa fase kehadiran AS di Afghanistan, Fase pertama bertujuan penumbangan Taliban, Fase kedua yakni Rekonstruksi Afghanistan oleh AS dan Fase ketiga Doktrin Kontra-Pemberontakan	Membahas mengenai tujuan dan kehadiran AS di Afghanistan	Tidak membahas mengenai Women for Afghan Women
62.	Kebijakan Amerika Serikat Menyetujui Perjanjian Perdamaian dengan Taliban dan Penarikan Pasukan Amerika Serikat dari Afghanistan di Masa Kepemimpinan Donald Trump (Purba P. Safna et al., 2022)	Safna Putri Purba, Reni Windiani, Satwika Paramasatya, <i>Jurnal of International Relation Universitas Diponegoro</i> , (2022)	International Relations	US Foreign Policy	Pengaruh NATO dan pengaruh domestic persepsi Trump terhadap konflik di Afghanistan yang menghasilkan kebijakan AS melalui penarikan pasukan militer dan damai dengan kelompok Taliban.	Membahas mengenai penarikan pasukan militer AS dibawah pemerintahan Joe Biden	Tidak membahas mengenai bantuan luar negeri AS di Afghanistan

63.	Tindakan Amerika Serikat Dalam Memerangi Terorisme Di Afghanistan dan Hubungannya Dengan Prinsip Non Intervensi (Prawira & Jaya, 2023)	Beni Prawira Candra Jaya, Tirtayasa Journal of International Law,	International Relations	US Foreign Policy in Afghan	Alasan AS melakukan tindakan serangan militer di Afghanistan dengan alasan kemanusiaan karena ada prinsip non intervensi	Membahas mengenai alasan AS masih berhubungan dengan Afghanistan	Tidak membahas mengenai Women for Afghan Women
64.	Gerakan Taliban Antara Jihad, Makar Serta Tragedi Kemanusiaan di Afghanistan (Hasyim & Massi, 2022)	Muhammad Syarif Hasyim, Atma R Massi, Comparativa Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab dan Hukum, 2022	Law	Afghanistan under Taliban Government	Isu kemanusiaan semakin parah setelah kembalinya Taliban berkuasa dan menarik masyarakat internasional, dengan tragedi ini masyarakat Afghanistan hanya menunggu mendapatkan suaka dan bantuan dari negara lain	Membahas mengenai kondisi masyarakat Afghanistan dibawah pemerintahan Taliban	Tidak membahas mengenai Women for Afghan Women
65.	Rasionalitas Amerika Serikat Dalam Perjanjian Damai dengan Taliban Pasca Konflik di Afghanistan (Wayan et al., 2021)	Ni Wayan Ayu Suwari, Sukma Sushanti & A.A. Ayu Intarn Parameswari, Jurnal, (2021).	International Relations	US National Interest in Afghanistan	AS menegosiasikan perjanjian damai dengan Taliban, mengakhiri kerugian besar dari invasi, tetapi mengabaikan kepentingan mereka di Afghanistan.	Membahas mengenai kepentingan nasional AS di Afghanitsan	Tidak membahas mengenai kepentingan nasional AS melalui WAW
66.	Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat: Perjanjian Damai dengan Taliban Tahun	Awani Yamora Masta, Society, 2022	International Relations	US Foreign Policy in Afghanustan	Keterikatan antara AS dan Taliban oleh Kesepakatan damai dan perjanjian seperti mengurangi kekerasan, menarik pasukan asing,	Membahas mengenai perdamaian antara AS dan Taliban	Tidak membahas mengenai bantuan luar negeri AS

	2020, (Masta, 2022)				menjamin Afghanistan tidak akan menjadi tempat berlindungnya teroris		
67.	Latar Belakang Berkuasanya Kembali Taliban di Afghanistan Pada Tahun 2021 (Salsabila I. Desfi, 2023)	Desfi Indah Salsabila, Jurnal Pena Wimaya, 2023	International Relation	US Foreign Policy in Afghanistan	Kebijakan penarikan pasukan AS dan NATO adalah salah satu faktor keberhasilan Taliban dalam mengambil alih control wilayah dan perubahan dalam konstruksi identitas Taliban	Membahas mengenai kebijakan Amerika Serikat di Afghanistan	Tidak membahas mengenai bantuan AS di Afghanistan
68.	<i>Afghan Women and Children's Health: Three Main Challenges under Taliban and COVID-19</i> (Martellucci et al., 2021)	Ceclilia Acuti Martellucci, Shohra Qaderi, Tetsuya Tanimoto & Akihiko Ozaki, Journal of Global Health, (2021).	Women's Health Studies	Afghan Women	Tantangan wanita dan anak Afghanistan dalam hal kesehatan dan dampak pemerintahan Taliban pada saat pandemic Covid-19, faktor yang memperparah kondisi masyarakat Afghanistan	Membahas mengenai kurangnya dukungan Taliban terhadap perempuan Afghanistan	Tidak membahas mengenai Bantuan AS melalui WA
69.	Kebijakan Ashraf Ghani Terhadap Kembali Berkuasanya Kelompok Taliban di Afghanistan Tahun 2021 (Umam Khotibul, 2022)	Khotibul Umam, International Conference on Islam, (2022).	International Relations	afghanistan government policy	Presiden Ashraf Ghani yang meninggalkan Afghanistan dan tidak melakukan upaya dalam mencegah kekacauan di negara tersebut	Membahas mengenai kekacauan Afghanistan karena Taliban kembali berkuasa	Tidak membahas mengenai bantuan luar negeri AS di Afghanistan
70.	<i>The Taliban in Afghanistan</i> (Maizland L., 2021)	Lindsay Maizland, Council Foreign Relations, (2021).	International Relations	Taliban	Keadaan Afghanistan dibawah rezim Taliban dan strategi moral AS di Afghanistan tentang	Membahas mengenai kehadiran Taliban sejak 2021 setelah dua dekade AS di Afghanistan	Tidak membahas mengenai bantuan luar negeri AS melalui WAW

					keandalan AS di Afghanistan		
71.	<i>Comparing US and Chinese Foreign Aid in The Era of Rising Powers</i>  (Regilme, & Hodzi, 2021)	Salvador Santino F. Regilme, Jr & Hodzi, <i>The International Spectator</i> , Taylot & Francis, 2021)	International Relations	Foreign Aid	Bantuan luar negeri AS dan China menunjukkan kepentingan politik dan ekonomi strategis kedua negara itu masing-masing. Untuk meningkatkan reputasi sosial dan legitimasi negara donor di sistem internasional	Membahas mengenai bantuan luar negeri AS untuk mempertahankan citra AS sebagai negara donor terbesar untuk meningkatkan citra AS di sistem Internasional	Tidak membahas mengenai bantuan luar negeri AS melalui WAW
72.	<i>Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif kepada Aliran Utama Pemikiran Femisnisme</i> (Regilme, & Hodzi, 2021)	Rosmarie Tong, <i>Book of Jelasutra</i> , 2004	Feminisme	Feminim	Penulis menekankan pemikiran feminisme dengan cabang feminisme seperti, feminisme liberal, feminisme radikal, feminisme marxist dll	Membahas mengenai konsep feminisme	Tidak membahas mengenai feminisme di Afghanistan
73.	<i>Tiongkok's Foreign Aid Policy: Motive and Methode</i> (Lengauer, 2011)	Lengauer S, 2011	Foreign Policy	Foreign Aid	Bantuan luar negeri salah satunya bangunan pembangunan	Membahas mengenai foreign aid sebagai alat kebijakan luar negeri	Tidak membahas mengenai bantuan luar negeri As
74.	<i>Afghanistan and the Failure of Liberal Peacebuilding</i> (Dodge Toby, 2021)	Toby Dodge 2021, <i>Journal of Survival</i> , (2021).	International Relations	Kegagalan AS dalam upaya membawa ideologi liberal di Afghanistan.	AS membangun dominasi Timur Tengah, penarikan militer AS di Afghanistan berdampak bagi sekutu dan kekuatan lain di kawasan.	Membahas mengenai kepentingan AS di Timur Tengah	Tidak membahas mengenai bantuan luar negeri AS di Afghanistan

75.	<i>Afghanistan's future under the Taliban regime: engagement or isolation?</i>  (Yousaf & Jabarkhail, 2022)	Farooq Yousaf & Moheb Jabarkhail, <i>Intelligence and Counter Terrorism</i> , (2022).	International Relations	Kondisi Afghanistan setelah Taliban kembali berkuasa di Afghanistan	Taliban menunjukkan ketidakpedulian dan siap menghadapi isolasi internasional dengan membatasi hak-hak perempuan.	Membahas mengenai pembatasan hak perempuan di Afghanistan oleh Taliban	Tidak membahas mengenai bantuan luar negeri AS di Afghanistan
-----	---	---	-------------------------	---	---	--	---

## **2.2. Kerangka Konseptual**

### **2.2.1. Feminism as National Interest**

Konsep *Feminism as National Interest* merupakan integrasi dari dua konsep, yaitu feminisme dan kepentingan nasional. Konsep ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana feminisme, sebagai sebuah aliran pemikiran, dapat dianggap sebagai kepentingan nasional suatu negara dan bagaimana hal tersebut dapat diaplikasikan dalam kebijakan luar negeri negara tersebut.

Kajian Feminisme menjadi salah satu isu yang di sorot oleh Hubungan internasional (HI), memberikan pandangan lain untuk memahami dan menangani berbagai isu global melalui perspektif gender. Feminisme pertama kali muncul sebagai gerakan yang berjuang untuk hak-hak perempuan sebagai manusia yang setara dengan laki-laki. Gerakan ini merupakan reaksi terhadap diskriminasi gender yang dihasilkan oleh sistem patriarki yang mengendalikan kehidupan perempuan dalam budaya. Feminisme pertama muncul di gelombang pertama, sering kali dikaitkan dengan karya Mary Wollstonecraft sebagai pelopor Feminisme Liberal, “*The Vindication of the Rights of Woman*” (1792), dan berakhir ketika perempuan memperoleh hak suara di awal abad ke-20. karya Wollstonecraft merupakan titik awal penting dalam gerakan feminisme modern. Wollstonecraft menyeru agar perempuan diberikan kesempatan untuk mengembangkan rasionalitas mereka dan mendesak agar pendidikan anak perempuan di sekolah negeri setara dengan pendidikan anak laki-laki. Menurut Wollstonecraft, pendidikan semacam itu akan membantu perempuan mengembangkan intelektualitas mereka, sehingga mereka dapat tumbuh menjadi individu yang mandiri (Komang & Suwastini, 2013).

Pada Gelombang kedua, aliran yang biasa dikenal sebagai aliran kiri ini memiliki sifat yang lebih radikal. Feminisme radikal ini berakar dari reaksi sejumlah feminis yang merasa bahwa feminisme liberal tidak memfasilitasi mereka karena adanya perbedaan ras dan kelas, serta protes terhadap kebrutalan Amerika dalam perang Vietnam (Siegel, 2007). Pada gelombang ini muncul konsep utama dari feminisme radikal adalah keyakinan bahwa kekuasaan patriarki beroperasi dalam institusi-institusi pribadi seperti pernikahan, pengasuhan anak, dan kehidupan seksual (Komang & Suwastini, 2013).

Pandangan ini menyoroti ketimpangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan sebagai akar dari kekerasan berbasis gender. Feminisme radikal berpendapat bahwa patriarki, sebagai sistem sosial yang menempatkan laki-laki di posisi dominan, adalah penyebab utama kekerasan terhadap perempuan. Membahas mengenai kekerasan terhadap perempuan berkaitan dengan konsep kekerasan berbasis *Gender Based Violence (GBV)*. Jacqui True, seorang ahli yang terkenal dalam bidang globalisasi dan gender, memberikan kerangka luas untuk memahami kekerasan berbasis gender (*gender-based violence/GBV*) sebagai segala bentuk kekerasan yang dialami seseorang karena jenis kelaminnya. Ini mencakup berbagai bentuk kekerasan seperti kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan ekonomi. True menekankan bahwa GBV seringkali merupakan manifestasi dari ketimpangan gender yang mendalam dalam masyarakat, di mana perempuan dan anak perempuan biasanya menjadi korban utama. True juga mengidentifikasi beberapa faktor risiko yang dapat meningkatkan kerentanan terhadap GBV, seperti kemiskinan, konflik bersenjata, norma budaya yang patriarkal, dan kurangnya akses terhadap keadilan dan perlindungan hukum. Selain itu, ia menyoroti bahwa GBV tidak hanya terjadi di tingkat domestik, tetapi juga di komunitas, tempat kerja, publik, dan bahkan secara transnasional (True Jacqui, 2021).

Diskusi feminisme biasanya melibatkan analisis tentang dinamika hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat, serta hak, status, dan peran perempuan dalam lingkungan domestik dan publik. dari Asia Selatan Kamla Bashin dan Nighat Said Khan, dua tokoh feminis, mendefinisikan feminisme sebagai konsep yang kompleks dan dinamis yang selalu beradaptasi dengan realitas sosial dan budaya yang menjadi latar belakang gerakan tersebut. Mereka juga menekankan bahwa definisi feminisme dapat berbeda-beda tergantung pada tingkat kesadaran, persepsi, dan aksi yang diambil oleh para feminis di berbagai tempat dan waktu (Said, 2004)

Namun, penting untuk memberikan definisi yang jelas dan komprehensif terhadap feminisme untuk menghindari kesalahpahaman. Oleh karena itu, para ahli menawarkan definisi yang lebih luas, yaitu kesadaran terhadap penindasan dan diskriminasi terhadap perempuan dalam masyarakat, tempat kerja, dan keluarga, serta tindakan sadar baik oleh perempuan maupun laki-laki untuk mengubah situasi

tersebut. Feminisme memperkenalkan konsep gender sebagai fondasi untuk menganalisis masyarakat. Anne Oakley pertama kali menggunakan istilah gender dalam konteks ini. Menurutnya, terdapat perbedaan antara seks dan gender. Seks merujuk pada perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, sementara gender mengacu pada konsep sosial dan budaya tentang sifat maskulin dan feminin. Beberapa aliran feminisme lahir dari berbagai perspektif yang berbeda, berikut merupakan Konsep Feminisme yang relevan dengan penelitian ini :

a. ***Feminisme Liberal***

Feminisme liberal adalah aliran yang berusaha untuk mencapai kesetaraan hak sosial dan politik bagi perempuan. Aliran ini menentang semua jenis diskriminasi terhadap perempuan. Pada abad ke-18, muncul argumen yang menyatakan bahwa karena kemampuan berpikir adalah hal yang membedakan manusia dari hewan, perempuan berhak mendapatkan pendidikan yang sama dengan laki-laki untuk mengembangkan kemampuan berpikir dan moral mereka (Sugihastuti, 2010). Mary Wollstonecraft, sebagai salah satu tokoh utama dalam gerakan feminisme liberal, sering menekankan pentingnya nalar, bahkan kadang-kadang di atas emosi atau perasaan. Menurut Jane Roland Martin, dalam upayanya untuk memperjuangkan hak-hak perempuan, Wollstonecraft mengusulkan suatu konsep pendidikan ideal bagi perempuan yang menghargai sifat-sifat yang biasanya dianggap maskulin, sementara mengesampingkan sifat-sifat yang dianggap feminin (Tong, 2010).

Adapun pada penelitian ini, konsep feminisme yang akan digunakan yaitu Feminisme Liberal. Feminisme liberal menekankan persamaan hak sosial dan politik antara perempuan dan laki-laki, serta menentang segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Dalam konteks ini, feminisme liberal dapat menjadi landasan untuk memahami upaya WAW dalam mempromosikan hak-hak perempuan di Afghanistan di bawah rezim Taliban. Feminisme liberal juga relevan karena mendukung pemberian pendidikan yang setara bagi perempuan, seperti yang ditekankan oleh Mary Wollstonecraft. Wollstonecraft, seorang tokoh utama dalam gerakan feminisme liberal, menganggap bahwa perempuan memiliki kapasitas nalar yang sama dengan laki-laki, dan oleh karena itu, mereka berhak untuk

mendapatkan pendidikan yang sama. Pandangan ini sejalan dengan upaya WAW dalam memberikan akses pendidikan yang lebih luas bagi perempuan Afghanistan di bawah Pemerintah Taliban yang patriarkis. Selain itu, feminisme liberal juga menyoroti pentingnya kesetaraan hak-hak perempuan, yang juga relevan dengan kondisi perempuan di Afghanistan di bawah pemerintahan Taliban yang seringkali membatasi hak-hak perempuan seperti larangan bersekolah, bekerja dan kebebasan lainnya. Dengan demikian, pendekatan feminisme liberal dapat memberikan kerangka yang tepat untuk menganalisis perjuangan WAW dalam mempromosikan hak-hak perempuan di Afghanistan di bawah rezim Taliban.

#### ***b. Feminis dalam Islam***

Feminis dalam Islam muncul seiring dengan munculnya gelombang ketiga feminisme pada tahun 1990-an. Menurut Fatima Seedat bahwa Islam dan feminisme, sebagai dua tradisi intelektual, dapat berintegrasi dalam kerangka feminis dalam Islam. Ini adalah titik temu antara Islam dan feminisme yang tidak mencoba menghapus perbedaan, tetapi mempertahankan jarak antara kedua tradisi tersebut untuk mencapai produktivitas yang lebih tinggi. Oleh karenanya, menurut feminis dalam Islam, sangat memungkinkan untuk melakukan studi yang menggabungkan Islam dan feminisme. Kedua tradisi ini memiliki basis keilmuan yang memungkinkan dialog antara keduanya (Seedat & King, 2012).

Para feminis dalam Islam berfokus pada dua isu utama dalam perjuangan mereka untuk kesetaraan gender. Pertama, mereka menekankan bahwa ketidaksetaraan gender dalam struktur sosial masyarakat Muslim bukanlah hasil dari ajaran Islam itu sendiri, melainkan hasil dari interpretasi yang bias oleh laki-laki yang kemudian diterima sebagai norma dalam Islam. Kedua, mereka berpendapat bahwa untuk mencapai kesetaraan gender, perlu dilakukan revisi terhadap sumber ajaran Islam yang berkaitan dengan gender, berdasarkan prinsip dasar ajaran Islam yaitu keadilan dan kesetaraan. Tujuan mereka adalah untuk menciptakan lingkungan yang adil dan kolaboratif antara laki-laki dan perempuan, baik di tingkat makro maupun mikro (Muqoyyidin, 2013).

Fokus utama feminis dalam Islam adalah mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah dalam ajaran Islam yang berakibat pada dominasi laki-laki dalam interpretasi Hadis dan Al-Qur'an. Melalui perspektif feminis, berbagai norma yang memiliki bias gender dijadikan pedoman dalam kehidupan beragama, terutama yang terkait dengan hubungan gender, perlu dianalisis dan direkonstruksi. Tujuannya adalah untuk mengembalikan semangat asli Islam yang lebih mengedepankan ideologi pembebasan perempuan dalam kerangka pembebasan martabat manusia (Muqoyyidin, 2013).

Amina Wadud, seorang tokoh feminis dan penulis dari AS, dikenal karena penafsirannya terhadap al-Qur'an melalui lensa feminisme. Lahir pada tahun 1952 dan memeluk Islam pada tahun 1972, Wadud menggunakan pendekatan hermeneutik dalam karyanya, "Al-Qur'an dan Perempuan: Membaca Ulang Teks Suci dari Perspektif Wanita". Menurut Wadud, bias patriarki dalam penafsiran al-Qur'an oleh ulama klasik merupakan salah satu penyebab ketidakadilan gender. Dia berpendapat bahwa al-Qur'an sejatinya menempatkan laki-laki dan perempuan secara adil, dengan hak dan kewajiban yang sama di semua bidang. Namun, penafsiran yang patriarkis dan kondisi politik serta sosial telah mendistorsi pemahaman ini. Untuk mendapatkan penafsiran yang objektif, Wadud menekankan bahwa seorang mufassir harus merujuk kembali pada prinsip-prinsip dasar al-Qur'an dan memiliki pandangan dunia yang jelas. Menurut pandangan Amina Wadud, bahwa misi Al-Quran sebagai kitab suci yang membawa keadilan belum tercapai. Hal ini dikarenakan para penafsir klasik hanya menginterpretasikan ayat-ayat tersebut dari sudut pandang dominasi pria terhadap wanita. Meski pembahasannya tentang posisi perempuan dalam bukunya tampak sederhana, Wadud menekankan semangat egalitarianisme dan tidak menganggap patriarki sebagai solusi untuk menggantikan patriarki. Dia percaya bahwa kedua sistem ini sama-sama berkontribusi terhadap status subordinat perempuan (Wadud et al., 2006).

Definisi ini menunjukkan betapa pentingnya pemahaman feminis dalam kerangka Islam melihat Afghanistan merupakan negara mayoritas beragama Islam, dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan kebebasan perempuan di

Afghanistan sesuai ajaran Islam, meski banyak tantangan yang dihadapi oleh perempuan di negara itu tetap sangat besar.

Mengacu pada kedua aliran feminisme tersebut, yakni Feminisme Liberal yang menganut ideologi barat dan Feminis dalam Islam yang berdasarkan ajaran Islam. Isu feminisme dan gender juga telah masuk ke dalam kajian yang relevan dengan masyarakat Afghanistan yang mengadopsi dan hidup berdampingan dengan ajaran agama Islam. Feminisme liberal menyoroti pentingnya hak-hak individu dan kebebasan pribadi, sementara feminis dalam Islam menekankan pada interpretasi yang lebih inklusif dari ajaran Islam. Keduanya dapat digunakan sebagai alat untuk memahami dan menantang penindasan terhadap perempuan di Afghanistan.

Untuk memahami kondisi di Afghanistan, feminisme liberal dan feminis dalam Islam menawarkan perspektif yang berbeda mengenai diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan di bawah pemerintahan Taliban. Feminisme Liberal menekankan pada kesetaraan hak dan kebebasan individu, mengkritik keras pembatasan yang diberlakukan Taliban terhadap pendidikan, pekerjaan, dan mobilitas perempuan. Organisasi seperti WAW berupaya menerapkan nilai-nilai ini dengan mempromosikan hak-hak perempuan dan menantang norma patriarki yang berlaku. Disisi lain, Feminis dalam Islam berusaha mereinterpretasi ajaran agama untuk mendukung kesetaraan gender, menilai tindakan Taliban dari sudut pandang kesesuaian dengan ajaran Islam yang sebenarnya, sering kali menolak interpretasi ekstrem yang diterapkan oleh Taliban. Perbedaan keduanya terletak pada pendekatan terhadap kebebasan dan hak-hak perempuan; feminisme liberal lebih universal, sementara feminis dalam Islam lebih mengakar pada konteks budaya dan agama.

Feminisme, yang telah berkembang sebagai ideologi di banyak negara, dapat digunakan sebagai alat kepentingan nasional untuk membentuk interaksi antarnegara dalam dinamika aktor internasional. Dalam bidang ilmu Hubungan Internasional, peran negara sangat krusial. Kepentingan nasional bukanlah hal baru. Hans J Morgenthau terkenal dengan pemikirannya bahwa politik internasional didasarkan pada kepentingan nasional, yang didefinisikan dalam kerangka kekuasaan. Menurut Morgenthau, kepentingan nasional mengacu pada kapabilitas

minimal sebuah negara untuk menjaga dan mempertahankan identitas politik, militer, dan budayanya dari intervensi negara lain (Morgenthau, 1965).

Donald E. Nuechterlein mendefinisikan kepentingan nasional sebagai serangkaian kebutuhan dan aspirasi suatu negara terhadap negara lain dalam lingkup eksternal (Nuechterlein, 1976). Menurut Nuechterlein, ada empat kategori kepentingan nasional, yaitu: pertama, kepentingan pertahanan yang mencakup perlindungan terhadap warga, wilayah, dan sistem politik suatu negara dari ancaman eksternal; kedua, kepentingan ekonomi yang berfokus pada peningkatan ekonomi negara melalui kerjasama ekonomi internasional; ketiga, kepentingan dalam tata internasional yang bertujuan untuk menciptakan atau mempertahankan sistem politik dan ekonomi internasional yang menguntungkan bagi negara tersebut; dan keempat, kepentingan ideologi yang ditujukan untuk melindungi ideologi negara dari ancaman ideologi asing.

Nuechterlein mengidentifikasi beberapa sektor kepentingan nasional suatu negara yang membentuk dasar kebijakan luar negerinya. Salah satu yang relevan dengan penelitian ini adalah kepentingan ideologi AS. Kepentingan ideologi berkaitan dengan perlindungan dan peningkatan nilai-nilai dan identitas kenegaraan di mana warga negara menghormati dan memuliakan identitas tersebut. Ideologi merupakan fondasi penting bagi beberapa negara, seperti negara-negara yang menganut paham sosialis atau komunis. Penyebaran kepentingan ideologi tidak terbatas pada aspek moral, melainkan sejauh mana nilai-nilai tersebut mempengaruhi kepentingan nasional. Menurut Yan Xuetong, kebudayaan suatu negara menjadi salah satu faktor penentu kepentingan nasional. Meskipun bukan hal yang signifikan, namun menjaga dan menyebarkan budaya serta melindungi budaya dari pengaruh luar juga merupakan bagian dari kepentingan nasional yang penting untuk diperjuangkan (Xuetong, 1997).

Konsep feminisme, terutama dalam konteks feminisme liberal, dapat dikorelasikan dengan konsep kepentingan nasional AS dalam bantuan luar negeri melalui WAW, dalam mempromosikan hak-hak perempuan di Afghanistan di bawah pemerintahan Taliban. AS memiliki kepentingan nasional yang meliputi kebutuhan dan keinginan terhadap negara-negara lain di lingkungan eksternal,

seperti yang didefinisikan oleh Donald E. Nuechterlein. Salah satu sektor kepentingan nasional yang relevan adalah kepentingan ideologi, yang bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan nilai-nilai dan identitas kebangsaan yang dihormati oleh warga negara. Ideologi yang kuat dapat mempengaruhi kebijakan dan tindakan suatu negara, baik dalam konteks domestik maupun internasional. Dalam konteks internasional, penyebaran ideologi bisa menjadi alat diplomasi atau bahkan alat untuk mempengaruhi negara lain. Oleh karena itu, penyebaran ideologi bisa dianggap sebagai sesuatu yang perlu dilakukan, meskipun sifatnya bisa dianggap ofensif oleh beberapa pihak.

Dalam konteks ini, feminisme liberal menyoroti pentingnya kesetaraan hak sosial dan politik bagi perempuan, yang sejalan dengan nilai-nilai demokratis dan hak asasi manusia yang menjadi landasan ideologis Amerika Serikat. Dengan mempromosikan hak-hak perempuan di Afghanistan, AS dapat memperkuat citra internasionalnya sebagai pembela hak asasi manusia dan kesetaraan gender, yang sesuai dengan kepentingan ideologisnya untuk melindungi dan memperjuangkan nilai-nilai demokratis.

Selain itu, konsep feminisme liberal juga dapat dikaitkan dengan kepentingan ekonomi AS dalam konteks bantuan luar negeri. Kepentingan ekonomi negara sering kali menjadi faktor penting dalam kebijakan luar negeri, karena pertumbuhan ekonomi yang stabil dapat mendukung keamanan dan stabilitas negara. Dengan membantu mempromosikan hak-hak perempuan di Afghanistan, AS juga dapat menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan berkelanjutan di negara tersebut, yang pada gilirannya dapat membuka peluang untuk kerja sama ekonomi yang lebih baik antara kedua negara.

Secara keseluruhan, konsep feminisme, terutama dalam pendekatan feminisme liberal, dapat dikorelasikan dengan konsep kepentingan nasional AS dalam bantuan luar negeri melalui WAW di Afghanistan. Dengan memperjuangkan hak-hak perempuan, AS tidak hanya mempromosikan nilai-nilai demokratis dan hak asasi manusia, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan berkelanjutan di wilayah tersebut, yang sesuai dengan kepentingan nasionalnya dalam memperjuangkan keamanan dan kesejahteraan negara.

### 2.2.2. Foreign Aid as Foreign Policy

Menurut Brown dan Ainsley, kebijakan luar negeri merupakan domain eksklusif negara karena hanya negara yang memiliki otoritas untuk merumuskan kebijakan yang berdampak luas pada masyarakat. Di masa lalu, kebijakan luar negeri cenderung terfokus pada keputusan perang atau damai. Namun, di era modern ini, hubungan internasional mencakup berbagai isu kompleks. Dengan demikian, kebijakan luar negeri kini memiliki cakupan yang lebih luas dan melibatkan lebih dari sekadar isu-isu politik rendah atau non-tradisional (Kirsten, 2005). Namun, pada saat ini, unit analisis dalam mempelajari kebijakan luar negeri tidak hanya terbatas pada negara saja, tetapi juga meluas pada faktor-faktor lain seperti politik domestik, ideosinkrasi, budaya strategis, dan politik birokrasi. Ini merupakan bagian dari sub-disiplin yang dikenal sebagai analisis kebijakan luar negeri (Foreign Policy Analysis) (Hudson, 2014)

Dampaknya adalah bahwa kebijakan luar negeri tidak lagi dianggap hanya sebagai hasil dari keputusan para elit politik, melainkan juga mencakup proses di dalamnya. Pendapat lain yang diajukan oleh Rosenau menyatakan kebijakan luar negeri merupakan strategi yang dijalankan oleh suatu negara, melibatkan seluruh aktivitas dan sikapnya, dengan tujuan untuk menghadapi dan memanfaatkan lingkungan luar demi keuntungan negara tersebut (A. A. B. P. dan Y. M. Yani, 2005Y). Menurut Mark R. Amstutz, kebijakan luar negeri didefinisikan sebagai serangkaian aksi eksplisit dan implisit yang diambil oleh pejabat negara untuk mendorong kepentingan nasionalnya di luar batas-batas teritorial negara tersebut (Jemadu, 2008).

Definisi tersebut menekankan pada tiga aspek penting, kebijakan luar negeri adalah serangkaian tindakan atau strategi yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai kepentingan nasional, yang cakupannya melampaui batas teritorial negara. Proses pelaksanaan kebijakan luar negeri ini dimulai dengan penetapan kebijakan dan keputusan oleh pemerintah dan lembaga terkait, baik sebagai perumus maupun pelaksana kebijakan. Dalam konteks ini, pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai faktor internal seperti aspirasi konstituen domestik, elemen masyarakat sipil, serta faktor eksternal seperti kepentingan kekuatan

internasional. Selain itu, dalam melaksanakan kebijakan luar negeri, pemerintah perlu memilih teknik atau instrumen yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yang disesuaikan dengan kekuatan nasional.

Bantuan luar negeri merupakan instrumen penting yang digunakan oleh suatu negara untuk mencapai tujuan kebijakan luar negerinya, sebagaimana dijelaskan oleh SAIIA (2021). Instrumen ini memiliki kesamaan dengan diplomasi, propaganda, dan aksi militer dalam konteks penggunaannya oleh suatu negara terhadap negara lain. Menurut Weisman, bantuan luar negeri adalah elemen dari diplomasi dan dapat dianggap sebagai alat kontrol yang efektif, khususnya dalam mempengaruhi perilaku negara lain (Lengauer, 2011). Dalam bukunya yang berjudul *International Politics: Framework of Analysis*, Holsti mendefinisikan bantuan luar negeri sebagai proses transfer uang, teknologi, atau pengetahuan teknis dari negara pemberi bantuan ke negara penerima (Holsti, 1995). Sementara itu, Morghentau dalam tulisannya, *A Political Theory of Foreign Aid*, mencoba untuk mengklasifikasikan bantuan internasional. Dia mengidentifikasi enam jenis kebijakan bantuan luar negeri, yaitu bantuan militer, bantuan kemanusiaan, bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, bantuan fundamental, bantuan untuk meningkatkan prestise, dan bantuan untuk pembangunan ekonomi.

Bantuan luar negeri ini memiliki beberapa motif, salah satu yang relevan dengan penelitian ini adalah motif kemanusiaan. Motif kemanusiaan melibatkan ekspresi simpati terhadap individu yang terdampak konflik dan upaya memberikan bantuan untuk mengatasi kemiskinan, khususnya di negara-negara berkembang. Hal ini dianggap sebagai dasar yang sangat penting. Dalam konteks motif kemanusiaan, terdapat beberapa aspek yang diperhatikan secara khusus yakni sebagai berikut:

1. Mengurangi kemiskinan merupakan tantangan yang dihadapi oleh setiap negara dan dapat diatasi dengan menciptakan peluang kerja, sehingga negara-negara tersebut dapat memenuhi hak hidup bagi warganya.

2. Menunjukkan kepedulian melalui bantuan kepada korban konflik adalah langkah yang signifikan dalam upaya mengurangi kemiskinan dan mengekspresikan solidaritas dengan negara lain.
3. Mengatasi tantangan dalam mempromosikan hak-hak perempuan dalam situasi krisis.

Bantuan luar negeri yang diberikan oleh Amerika Serikat juga memiliki tujuan sosial politik. Tujuan ini ditunjukkan melalui interaksi sosial politik antara negara donor dan negara penerima, yang dapat mempengaruhi kondisi politik di kedua negara tersebut. Motif perdamaian dan keamanan tidak hanya terkait dengan upaya militer, tetapi juga mencakup upaya untuk menjaga keamanan baik di tingkat nasional maupun internasional. Bantuan luar negeri dapat mendukung negara donor dalam usahanya untuk mewujudkan perdamaian.

- a. Ideologi merujuk pada pemahaman politik dan nilai-nilai kolektif yang ditujukan untuk mendukung negara yang memerlukan bentuk pemerintahan yang lebih demokratis. Dalam konteks ini, penghormatan terhadap hak asasi manusia dianggap sebagai ideologi yang memberikan motivasi.
- b. Demokrasi mendorong negara pendonor untuk membantu negara penerima dalam upaya untuk bebas dari penindasan dan mencegah konflik, demi kepentingan semua pihak, termasuk mereka yang saat ini hidup dalam kemiskinan dan terpinggirkan. Demokrasi menjadi landasan dalam upaya mengurangi kemiskinan dan mencegah konflik.
- c. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah kebutuhan masyarakat untuk hidup bebas dari penindasan dan untuk mendapatkan hak-hak yang sama. Upaya internasional dilakukan untuk mempromosikan penghormatan terhadap HAM. Penghormatan terhadap HAM dan prinsip demokrasi diutamakan dalam setiap aspek.
- d. Tujuan politik suatu negara diungkapkan melalui bantuan luar negeri. Tujuan ini mencakup kebijakan dan kepentingan nasional yang ingin dicapai.

- e. Motif perdamaian dan keamanan tidak hanya melibatkan aksi militer, tetapi juga mencakup langkah-langkah untuk menjaga stabilitas baik di tingkat nasional maupun global. Dukungan dari negara lain dapat memperkuat upaya negara penerima dalam mewujudkan perdamaian.

Tujuan dari bantuan luar negeri adalah untuk memperoleh pengakuan internasional bagi negara donor. Pengakuan ini memungkinkan negara tersebut untuk berpartisipasi dalam proyek pembangunan atau kerjasama internasional. Selain itu, negara tersebut akan mendapatkan penghormatan dari negara lain dan memiliki kemampuan untuk mengemukakan kebijakannya secara lebih efektif melalui kebijakan internasional.

Dalam konteks penelitian yang akan dilakukan tentang bantuan luar negeri AS melalui WAW untuk mempromosikan hak-hak perempuan di Afghanistan di bawah pemerintahan Taliban, konsep feminisme memiliki peran yang sangat penting. Feminisme, dalam konteks ini, merujuk pada motif gerakan sosial dan politik yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender dan menghapus diskriminasi yang dialami oleh perempuan. Bantuan luar negeri yang dilakukan melalui WAW dapat dilihat sebagai upaya konkrit untuk mendorong kesetaraan gender dan memperjuangkan hak-hak perempuan di Afghanistan. Feminisme sebagai konsep memandang bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk mendapatkan pendidikan, bekerja, berpartisipasi dalam kehidupan politik, dan memiliki kendali atas tubuh dan kehidupan mereka sendiri.

Dalam konteks bantuan luar negeri, feminisme dapat diinterpretasikan sebagai upaya untuk mengubah struktur sosial dan budaya yang membatasi perempuan dalam masyarakat tertentu. Dengan memberikan bantuan kepada organisasi seperti WAW, yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dan peningkatan hak-hak mereka, AS berkontribusi pada upaya global untuk mendorong kesetaraan gender dan mengakhiri diskriminasi terhadap perempuan di seluruh dunia. Selain itu, feminisme juga dapat memperluas pemahaman tentang konflik dan keamanan, dengan mengakui bahwa penindasan terhadap perempuan tidak hanya bersifat fisik atau ekonomi, tetapi juga dapat bersifat struktural dan sistemik. Dengan demikian, bantuan luar negeri yang diarahkan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan juga dapat dilihat sebagai bagian dari upaya

untuk menciptakan perdamaian yang berkelanjutan dan keamanan yang inklusif. Sehingga, konsep *Foreign Aid as Foreign Policy* dan *Feminism as National Interest* dapat menjadi kerangka teoritis yang kuat untuk menganalisis peran bantuan luar negeri dalam mempromosikan hak-hak perempuan di Afghanistan di bawah pemerintahan Taliban. Dengan melihat bantuan ini melalui lensa feminisme, dapat mengidentifikasi bagaimana upaya ini berkontribusi pada perubahan struktural dalam masyarakat dan membantu menciptakan kondisi yang lebih adil bagi perempuan di Afghanistan.

### **2.2.3. Teori Dependency**

Teori dependency, atau teori ketergantungan, merujuk pada kondisi di mana ekonomi negara-negara berkembang atau dunia ketiga sangat tergantung pada negara-negara maju atau negara inti. Hubungan yang terjalin antara negara-negara periferi dan negara-negara inti menciptakan suatu bentuk ketergantungan. Negara inti memiliki kemampuan untuk berkembang secara independen, sedangkan negara-negara periferi sangat tergantung pada perkembangan negara-negara inti. Ketergantungan ini dapat memberikan dampak positif atau negatif terhadap perkembangan negara-negara periferi. Dalam konteks teori ketergantungan, posisi negara-negara berkembang di bawah pengaruh ekonomi global dianggap sebagai sumber utama dari keterbelakangan mereka (Smith, 2018).

Konsep ketergantungan memungkinkan kita untuk melihat situasi internal negara-negara tersebut sebagai bagian dari ekonomi dunia. Dalam tradisi Marxian, teori imperialisme dikembangkan sebagai studi tentang proses perluasan pusat-pusat imperialis dan dominasi dunia mereka. Di era gerakan revolusioner Dunia Ketiga, kita harus mengembangkan teori hukum pembangunan internal di negara-negara yang menjadi sasaran ekspansi semacam itu dan diperintah oleh mereka. Langkah ini melampaui teori pembangunan yang berusaha menjelaskan keadaan negara-negara terbelakang sebagai akibat dari kelambanan atau kegagalan mereka mengadopsi pola-pola efisiensi yang menjadi ciri negara maju.

Teori Dependency menyoroti pentingnya elemen eksternal dalam pembangunan. Negara dengan ekonomi yang lebih kuat tidak hanya menghalangi karena keunggulan dalam kompetisi, tetapi juga berperan aktif dalam merombak

struktur sosial, politik, dan ekonomi negara yang lebih lemah. Menurut Robert A. Packenham menunjukkan bahwa kekuatan dari teori ketergantungan terletak pada penekanannya pada dimensi internasional, pertanyaan tentang dampak politik luar negeri (pusat versus periferi), kaitan antara perubahan internal di negara periferi dengan politik luar negeri negara maju, integrasi analisis ekonomi dengan analisis politik, dan diskusi tentang hubungan antarkelas di dalam negeri dan antarnegara dalam konteks internasional (World, 1970).

Teori Dependency menyoroti interaksi internal dalam masyarakat, termasuk struktur sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Teori ini beranggapan bahwa ada hubungan yang erat antara keterbelakangan dan pembangunan. Istilah “ketergantungan” digunakan untuk menunjukkan bahwa kemajuan di negara maju (pusat) menyebabkan keterbelakangan di negara berkembang (periferi) sebagai hasil dari proses sejarah yang disengaja, seperti yang dijelaskan dalam kerangka pemikiran Marx tentang eksploitasi. Menurut teori ini, negara-negara berkembang mengalami keterbelakangan karena negara-negara maju. Ketimpangan dalam hubungan antara negara berkembang dan negara maju dilihat sebagai upaya untuk mempertahankan aliran surplus ekonomi dari negara periferi ke negara pusat. Sebagai hasilnya, negara-negara berkembang mengalami kemiskinan, keterbelakangan, serta ketidakstabilan politik dan ekonomi (Rabbani, 2020).

Teori Ketergantungan adalah sebuah kerangka pemikiran yang sangat relevan untuk digunakan dalam penelitian ini. Teori ini dapat memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana bantuan luar negeri, dalam hal ini bantuan dari AS melalui WAW, dapat memengaruhi hak-hak perempuan di Afghanistan, terutama di bawah pemerintahan Taliban yang kontroversial.

Pertama, teori ketergantungan menyoroti bahwa negara-negara terpinggirkan atau dunia ketiga sangat bergantung pada negara-negara maju atau dunia pertama. Dalam konteks ini, bantuan luar negeri dari AS kepada Afghanistan dapat dipandang sebagai salah satu bentuk hubungan ketergantungan antara negara inti (Amerika Serikat) dan negara periferi (Afghanistan). Bantuan tersebut dapat memiliki dampak yang signifikan pada perkembangan dan kemandirian Afghanistan, terutama dalam mempromosikan hak-hak perempuan di bawah pemerintahan Taliban yang kontroversial.

Kedua, teori ketergantungan juga menyoroti bahwa negara-negara dengan ekonomi yang lebih kuat tidak hanya tinggi tidak hanya memanfaatkan keunggulan kompetitif mereka untuk mendominasi, tetapi juga aktif dalam membentuk struktur sosial, politik, dan ekonomi negara-negara berpenghasilan rendah. Dalam kerangka ini, bantuan asing dapat dilihat sebagai intervensi eksternal yang berpotensi mempengaruhi struktur sosial, politik, dan ekonomi di Afghanistan, khususnya dalam upaya mendukung hak-hak perempuan.

Ketiga, teori ketergantungan menekankan bahwa ketidakseimbangan dalam hubungan antara negara-negara dunia ketiga dan negara-negara dunia pertama dapat mengakibatkan negara-negara dunia ketiga mengalami kemiskinan, keterbelakangan, dan ketidakstabilan politik dan ekonomi. Dalam konteks ini, bantuan luar negeri dari Amerika Serikat melalui WAW dapat dilihat sebagai upaya untuk mengurangi ketidakseimbangan tersebut dengan memperjuangkan hak-hak perempuan di Afghanistan, meskipun di bawah pemerintahan Taliban yang kontroversial.

Dengan demikian, teori ketergantungan memberikan landasan teoretis yang kuat untuk memahami bagaimana bantuan luar negeri, khususnya dari AS melalui WAW, dapat memengaruhi hak-hak perempuan di Afghanistan di bawah pemerintahan Taliban. Teori ini dapat membantu menjelaskan dinamika kompleks antara bantuan luar negeri, ketergantungan ekonomi, dan hak asasi manusia, serta memberikan pandangan yang mendalam tentang bagaimana bantuan luar negeri dapat berperan dalam mempromosikan hak-hak perempuan di negara-negara yang terpinggirkan seperti Afghanistan.

### **2.3. Asumsi Penelitian**

Peneliti berasumsi bahwa Amerika Serikat memberikan bantuan luar negeri melalui WAW, sebuah organisasi yang berfokus pada hak-hak perempuan di Afghanistan. Kebijakan luar negeri Amerika Serikat ini, yang berupa bantuan luar negeri, dirancang untuk mengatasi potensi kekacauan yang mungkin terjadi akibat penarikan pasukan militer Amerika Serikat dari Afghanistan. Pemerintah Amerika Serikat berusaha menggunakan bantuan kemanusiaan ke Afghanistan sebagai instrumen yang lebih efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Afghanistan. Dalam kontras dengan rezim Taliban yang belum memiliki integritas pemerintahan yang solid, Amerika Serikat, yang menganut nilai-nilai liberalisme dan menekankan hak-hak perempuan di Afghanistan, berharap pendekatan ini dapat mendukung perempuan di Afghanistan dengan nilai-nilai tersebut dan mempertahankan pengaruhnya di Afghanistan.

Melalui kebijakan luar negerinya, AS memberikan bantuan luar negeri ke Afghanistan, yang sejalan dengan kepentingan nasionalnya. Amerika Serikat mempertahankan kepentingan ideologi liberal sebagai negara donor terbesar di Afghanistan dan menunjukkan dirinya sebagai negara adikuasa yang mendukung demokrasi dan hak asasi manusia. WAW mewakili kepentingan Amerika dalam agenda hak asasi manusia, khususnya kesetaraan gender di Afghanistan. Bantuan luar negeri AS merupakan salah satu sumber pendanaan utama WAW. Tujuan politik dan strategis dari bantuan tersebut sesuai dengan kepentingan nasional Amerika Serikat di Afghanistan, yaitu keamanan regional, promosi kesetaraan gender, demokrasi, dan hak asasi manusia. Bantuan luar negeri Amerika Serikat kepada WAW juga merupakan salah satu cara untuk menunjukkan komitmen AS terhadap isu-isu hak asasi manusia, khususnya hak-hak perempuan, di Afghanistan dan di seluruh dunia.

## 2.4. Kerangka Berpikir

